

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau lebih dikenal BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan Bank di Indonesia. Pada awalnya BPR Syariah dinilai kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, namun BPR Syariah selalu mencoba untuk memperbaiki kinerjanya dan mencoba untuk menjangkau lebih luas lagi dengan menambah jaringan kantornya. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Jumlah Jaringan Kantor dan Jumlah Pekerja BPRS

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163
Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	433
Jumlah pekerja	2581	2799	3172	3773	4359	4826	4853

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK, September 2014 13 dan 17

Dari tabel di atas terbukti setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kantor cabang maupun penambahan jumlah BPRS baru. Pada tahun 2008 terdapat 131 jumlah BPRS di seluruh Indonesia, pada tahun 2014 di bulan September mengalami peningkatan sebanyak 32 BPRS sehingga menjadi 163 BPRS yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan jumlah kantor cabang yang ikut meningkat bersamaan dengan jumlah bank yang juga meningkat. Tahun 2008 hanya sebanyak 202 lalu meningkat menjadi 225 di tahun 2009, lalu pada tahun 2014 bulan September meningkat menjadi 433 kantor cabang BPRS yang ada di Indonesia. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah BPRS dan jumlah kantor yang ada di Indonesia meningkat pula jumlah pekerja di BPRS. Peningkatan itu sebagai bukti bahwa BPRS mencoba untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, serta mencoba untuk menambah lapangan kerja bagi masyarakat sesuai dengan tujuan BPRS itu sendiri.

Fungsi BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit atau pembiayaan, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus

urbanisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sudarsono, 2008 : 95). Salah satu BPR Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam di antaranya adalah BPRS BDW Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut BPR Syariah menawarkan pembiayaan, salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan modal kerja murabahah produktif.

Modal kerja itu sendiri adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha (Herdiansyah, 2008 : 15). Pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang di tunjukkan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi melalui sistem murabahah, yang pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan laba atau rugi dari hasil kerja sama dengan pengusaha. Pembiayaan modal kerja murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan (jual beli) yang disepakati bersama. Atau menjual barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Mustofa, 2012 : 34).

Pembiayaan modal kerja murabahah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tetapi secara umum disimpulkan ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Pembiayaan produktif, pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Herdiansyah, 2008: 16).

Dalam pembahasan di atas dikatakan pembiayaan modal kerja murabahah dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Maka dari itu peneliti hanya membatasi penelitian ini dengan hanya mengambil pembiayaan modal kerja murabahah produktif untuk diteliti. Dengan diberikannya pembiayaan modal kerja murabahah produktif diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai ekonomi BPRS BDW Yogyakarta dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelum diberikannya pembiayaan modal kerja murabahah produktif ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan yang perlu dipertimbangkan yaitu agar pembiayaan modal kerja produktif yang diberikan pada nasabah UMKM bisa tersalurkan secara optimal. Ada dua tahapan yang perlu diperhatikan yaitu sebelum dan sesudah diberikannya pembiayaan modal kerja murabahah produktif tersebut bisa tersalurkan secara optimal.

Suatu pembiayaan dikatakan optimal apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank bisa tersalurkan secara baik dan bisa memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu kepada pihak pemberi pinjaman pihak bank (BPRS BDW Yogyakarta) dan pihak penerima pinjaman modal kerja murabahah produktif (nasabah). Dengan kata lain, bank yang menyalurkan pembiayaan itu mengalami perkembangan atau peningkatan asetnya, dan penerima pinjaman modal kerja (nasabah) mengalami peningkatan dalam usahanya. Suatu pembiayaan dikatakan tidak optimal apabila pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh pihak bank pada pihak penerima penyaluran (nasabah) tidak bisa dikelola dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian pada bank itu sendiri maupun kerugian yang akan ditanggung nasabah penerima pinjaman modal kerja. Hal ini akan berdampak negatif pada aset bank yang memberi pinjaman modal kerja murabahah produktif dan usaha nasabah penerima pinjaman modal kerja murabahah produktif tersebut, sehingga mengakibatkan pembiayaan yang tidak optimal atau pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah (Muhammad, 2005 :15).

Menurut Siswanto Sutojo, kredit atau pembiayaan yang bermasalah atau tidak optimal dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab yaitu : Pertama, faktor intern, penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna. Misalnya *Account officer* dan *credit analyst* yang

bertugas kurang mampu atau karena pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran angsuran dan pelunasan kebanyakan debitur perorangan adalah penghasilan tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran pembiayaan menjadi terganggu. Kedua, salah satu faktor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter negara atau sektor usaha. Bagi banyak perusahaan berdampak langsung memburuknya kondisi ekonomi negara berpengaruh pada tingkat probabilitas dan likuiditas keuangan yang menurun (Al-Makki, 2010 ; 7).

Pembiayaan yang bermasalah atau tidak optimal rentan terjadi ketika pembiayaan telah direalisasikan, hal ini bisa disebabkan kurangnya pengawasan dari *Account officer*. Salah satu upaya *Account officer* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah. Karena pembiayaan bermasalah atau tidak optimal timbul bukan tiba-tiba tetapi umumnya melalui suatu priode di mana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah untuk membayar pembiayaannya tersebut. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan diharapkan perjalanan pembiayaan dapat diselamatkan ketika terjadi masalah dan pembiayaan berjalan dengan baik dan secara optimal, dan nasabah dapat membayar kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan penyaluran pembiayaan. Selain

pengawasan dan pembinaan ada kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan operasional BPRS memerlukan strategi operasional yang baik dengan cara BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian pada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal sehingga mempunyai prospek bisnis yang baik, BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan skala menengah dan kecil, serta BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan (Al-Makki, 2010: 7-8). Bentuk kebijakannya adalah sebagai berikut : Pertama, kebijakan umum adalah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut: Seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syariah di samping aspek ekonomisnya. Kedua, pengambilan keputusan pembiayaan dalam realisasi suatu pembiayaan secara *inheren* terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan yang bermasalah sehingga terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau Pembantu, dapat diambil keputusan, keputusan yang obyektif. Keputusan yang mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus

komite pembiayaan, berapapun besar limit pembiayaan yang dinilai atau diputus (Muhammad, 2005: 37-39).

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini sangat menarik untuk kemudian diteliti terkait dengan sebuah perusahaan mampu atau tidaknya mengoptimalkan penyaluran pembiayaan modal kerjanya pada nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut yang dalam hal ini terkhusus pada PT. BPRS BDW Yogyakarta. Dari permasalahan di atas kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Optimalisasi Produk Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Produktif BPRS BDW Yogyakarta terhadap Perkembangan UMKM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang diberikan PT. BPRS BDW Yogyakarta dalam mengoptimalkan penyaluran produk pembiayaan modal kerja murabahah produktif terhadap perkembangan UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh strategi dan kebijakan yang digunakan PT. BPRS BDW Yogyakarta dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah produktif dalam perkembangan UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pengaruh strategi dan kebijakan yang digunakan PT. BPRS BDW

Yogyakarta dalam mengoptimisasi penyaluran produk pembiayaan modal kerja murabahah produktif terhadap perkembangan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang diberikan PT. BPRS BDW Yogyakarta dalam mengoptimisasi penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah produktif terhadap perkembangan UMKM.
2. Mengetahui pengaruh strategi dan kebijakan yang digunakan pembiayaan PT. BPRS BDW Yogyakarta dalam penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah produktif terhadap perkembangan UMKM.
3. Mengetahui pengaruh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta strategi dan kebijakan dalam penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah produktif PT. BPRS BDW Yogyakarta terhadap perkembangan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Menambah wawasan bagi penulis mengenai penyaluran dana pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengoptimalkan pemberian pembiayaan modal kerja murabahah pada UMKM serta mengetahui pengawasan dan pelaksanaan serta strategi dan kebijakan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam mengoptimalkan pembiayaan modal kerja murabahah.

- b. Menambah konsep baru yang dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyaluran dana dalam mengoptimalkan pemberian pembiayaan modal kerja murabahah produktif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM nasabah